



# OGP Local Action Plan Template

## Off-line fillable form for the Open Government Strategic Vision

This section of the action plan lays out the strategic vision that will guide the actions of the jurisdiction throughout the action plan period. It should be based on policy principles, seek to achieve long-term outcomes and identify medium-term outputs.

Below is a fillable template with the fields of information to be completed that you can use to draft this section of the action plan. Please make sure you note the character limit for each textbox. **Please note that the final action plan must be submitted online through a platform provided by OGP Local.**

-----  
---

### 1. Duration

1.1. End of term of the current administration (*month/year*)

Desember 2023

1.2. End of the action plan period (*month/year*)

(*Two months before the end of the government term*)

Oktober 2023

### 2. Foreword(s)

*The foreword can be written jointly or separately by government and civil society representatives or a multi-stakeholder forum. This should include the ambition for this plan and how they plan to work together in implementation and monitoring. (Kata pengantar dapat ditulis secara bersama-sama atau terpisah oleh perwakilan pemerintah dan masyarakat sipil atau forum multi-stakeholder. Ini harus mencakup ambisi untuk rencana ini dan bagaimana mereka berencana untuk bekerja sama dalam implementasi dan pemantauan.)*

*Maximum 2000 characters*



Pemerintahan yang terbuka yang mendukung nilai akuntabilitas, responsif dan inklusif sejalan dengan visi dan misi Pembangunan Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah masing-masing. Salah satu misi pembangunan Provinsi NTB, Misi yang kedua adalah mewujudkan NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari Korupsi Kolusi Nepotisme dan berdedikasi. Sedangkan Misi Ketiga Kabupaten Sumbawa barat adalah Kabupaten Sumbawa Barat BAIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Misi ini diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel, bebas korupsi kolusi dan nepotisme serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan dan terintegrasi.

Pemerintah Provinsi NTB menetapkan beberapa program unggulan, diantaranya adalah NTB Care, NTB Satu Data, dan Revitalisasi Posyandu. Program NTB Care mendorong keterlibatan publik melalui penyampaian permasalahan, masukan dan kritik yang konstruktif bagi kelanjutan pembangunan daerah yang lebih baik. Satu Data NTB adalah program peningkatan tata kelola data untuk menghasilkan data pembangunan yang berkualitas. Program Revitalisasi Posyandu bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan ketahanan keluarga melalui pengembangan layanan posyandu keluarga. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menetapkan program unggulan daerah yakni Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) pada semua tahapan pembangunan daerah dengan melibatkan masyarakat, organisasi non pemerintah dan akademisi. Melalui program PDPGR ini partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan daerah dapat ditingkatkan.

Kedua Pemerintah Daerah telah melakukan kerjasama dan mendorong partisipasi berbagai pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah dalam setiap tahapan penyelenggaraan komitmen OGP Local. Forum kolaborasi OGP Local NTB akan diselenggarakan secara reguler untuk mewadahi berbagai pemangku kepentingan dalam proses ko-kreasi sejak penyusunan rencana aksi hingga monitoring dan evaluasi. Dengan cara ini diharapkan seluruh komitmen OGP Local dapat terselenggara dengan baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

### **3. Upload the introduction letter by the head of the jurisdiction, if available.**

*This option is available in the online form.*

Buat Sambutan dari Gubernur sebagai bagian pendahuluan dari dokumen Rencana Aksi

### **4. Open Government Challenges, Opportunities and Strategic Vision**

*This subsection details the Open Government Strategic Vision in your local area that should guide the commitments for the action plan period:*

- 4.1. What is the long-term vision for open government in your context and jurisdiction? **(Apa visi jangka panjang untuk pemerintahan terbuka dalam konteks dan yurisdiksi Anda?)**



*Maximum 1000 characters*

Visi jangka panjang Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk pemerintahan terbuka adalah mewujudkan Nusa Tenggara Barat bersih dan melayani melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan berdedikasi. Sedangkan visi Kabupaten Sumbawa Barat adalah Mewujudkan pemerintahan daerah yang partisipatif, bersih, transparan, inovatif, inklusif dan akuntabel. Visi kedua pemerintahan ini memiliki persamaan yang erat dan secara eksplisit menegaskan komitmen masing-masing yurisdiksi untuk melaksanakan seluruh prinsip-prinsip pemerintahan terbuka dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas, aksesibel, dan non-diskriminatif bagi seluruh warga.

4.2. What are the achievements in open government to date (for example, recent open government reforms)? **(Apa pencapaian dalam pemerintahan terbuka hingga saat ini (misalnya, reformasi pemerintahan terbuka baru-baru ini)?)**

*Maximum 1500 characters*

Provinsi NTB :

- Pencapaian kualifikasi Informatif dalam penilaian keterbukaan informasi publik yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Republik Indonesia pada tahun 2019 dan 2020;
- Terselenggaranya keterbukaan informasi public di tingkat desa melalui program Desa Benderang Informasi (DBIP);
- Telah tersedia berbagai kanal pengaduan layanan publik berbasis teknologi informasi dan sosial media : SMS Center, Website NTB Care, Mobile app NTB Care, Akun Sosial Media (Facebook, Instagram);
- Telah terbentuk dan diselenggarakan Forum Data serta penyediaan layanan Data Terbuka secara online melalui portal Satu Data NTB;
- Terbentuknya posyandu keluarga sebanyak 4185 yang tersebar di beberapa desa di seluruh kabupaten/kota

Kabupaten Sumbawa Barat :

- Predikat keterbukaan informasi publik dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan, dari "Cukup Informatif" pada tahun 2018, "Menuju Informatif" pada tahun 2019; lalu pada tahun 2020 mendapatkan predikat tertinggi, yaitu Kabupaten Informatif;
- Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah mengalami peningkatan, yang ditunjukkan oleh opini Badan Pemeriksa Keuangan atas pengelolaan keuangan daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan nilai "A" untuk Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Sumbawa Barat sejak tahun 2019.
- Tingkat kepatuhan pelayanan public Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2019 berada pada kategori "Zona Hijau" atau baik dengan skor 81,94 poin;

4.3. What are the current challenges/areas for improvement in open government that the jurisdiction wishes to tackle? **(Apa saja tantangan/bidang untuk perbaikan dalam pemerintahan terbuka yang ingin ditangani oleh yurisdiksi?)**

*Maximum 1000 characters*





Tantangan dan area perbaikan yang akan ditangani pada implementasi pemerintahan terbuka saat ini adalah; (1) penguatan kebijakan dan regulasi program unggulan daerah, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan inovasi daerah, dan penguatan partisipasi masyarakat; (2) peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan yang professional, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab; (3) pengelolaan keterbukaan informasi publik oleh PPID yang dapat mendorong partisipasi publik; (4) peningkatan partisipasi masyarakat dalam bergotong royong (sinergi dan kolaborasi) mendukung program-program pemerintah daerah melalui revitalisasi kelembagaan dan fungsi Posyandu; (5) peningkatan kualitas layanan pengaduan masyarakat agar berdaya guna, cepat dan tuntas dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik dan sumber data masukan untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan; (6) Penyediaan data berkualitas dan Integrasi sistem pengelolaan data pembangunan terpadu dan terbuka dalam mendukung program satu data Indonesia;

4.4. What are the medium-term open government goals that the government wants to achieve? **(Apa tujuan open government jangka menengah yang ingin dicapai oleh pemerintah?)**

*Maximum 1000 characters*

Provinsi NTB :

- Seluruh Perangkat daerah mencapai kualifikasi Informatif dalam penilaian Keterbukaan Informasi Publik
- Seluruh Perangkat daerah dapat merespon pengaduan masyarakat secara cepat, tepat dan tuntas serta terkoordinasi dengan baik
- seluruh data berkualitas dari seluruh perangkat daerah dapat terkumpul dan dipublikasikan secara luas
- Terbentuknya 6000 Posyandu Keluarga di seluruh desa

Kabupaten Sumbawa Barat :

- Meningkatkan transparansi, partisipasi, responsifitas dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Meningkatkan inklusifitas dan kualitas perencanaan dan anggaran daerah; dan
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah melalui pengembangan inovasi daerah.

4.5. How does this action plan contribute to achieve the Open Government Strategic Vision? **(Bagaimana rencana aksi ini berkontribusi untuk mencapai Visi Strategis Pemerintahan Terbuka?)**

*Maximum 1000 characters*

Rencana aksi konsorsium pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa Barat akan berkontribusi pada Visi Strategis daerah melalui :

- Pengelolaan sistem pengaduan masyarakat yang baik melalui program NTB Care dan Forum Yasinan yang akan memberikan saluran kepada masyarakat untuk menyampaikan pengaduan dan masukkan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga akan menjadi umpan balik bagi perbaikan kualitas layanan publik.

- Program Satu Data NTB dan KSB bertujuan untuk menyediakan data pembangunan yang berkualitas yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat luas, salah satunya sebagai bahan mengevaluasi kinerja pemerintah.
- Revitalisasi Posyandu menjadi Posyandu Keluarga dan Posyandu Gotong Royong yang berfungsi sebagai Pusat pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, lingkungan dan bidang lainnya;
- Memperkuat Kebijakan/regulasi dan mengembangkan rencana aksi kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta dalam Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Pada Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong;
- Penguatan Perlindungan dan Pemberdayaan, Penyandang PMKS dan Kelompok Rentan Lainnya Berbasis Gotong Royong, dan
- Penguatan Inovasi Perangkat Daerah untuk Meningkatkan Pelayanan Publik.

4.6. How does the open government strategic vision contribute to the accomplishment of the current administration's overall policy goals? **(Bagaimana visi strategis pemerintahan terbuka berkontribusi pada pencapaian tujuan kebijakan keseluruhan pemerintahan saat ini?)**

*Maximum 1000 characters*

NTB yang bersih dan melayani sebagai visi strategis pemerintahan yang terbuka akan mendorong terwujudnya Pemerintahan yang professional, melayani, bebas dari KKN (korupsi, kolusi dan Nepotisme), transparan dan akuntabel. Cita-cita Pemerintahan seperti ini yang menjadi salah satu pilar visi Nusa Tenggara Barat yaitu membangun Nusa Tenggara Barat Yang Gemilang

Kabupaten Sumbawa Barat BAIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik merupakan salah satu pendukung utama dalam pencapaian tujuan kebijakan pemerintahan daerah sebagaimana telah dituangkan dalam RPJMD 2021-2026 sehingga diharapkan visi strategis tersebut dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel sesuai dengan misi 3 RPJMD 2021-2026.

## 5. Engagement and Coordination in the Open Government Strategic Vision and OGP Action Plan

5.1. Please list the lead institutions responsible for the implementation of this OGP action plan? **(Sebutkan lembaga utama yang bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana aksi OGP ini?)**

*Maximum 1000 characters*

<b>Office, Agency, Department or Ministry</b>
<b>Provinsi NTB :</b>
Badan Pusat Statistik (BPS)
Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda)
Dinas Komunikasi, Informatika, dan statistik
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Dinas Kesehatan
<b>Kabupaten Sumbawa Barat :</b>
Sekretariat Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinas Kesehatan
Dinas Komunikasi dan Informatika
Dinas Sosial
Inspektorat Daerah
<b>Add lines above as necessary</b>

- 5.2. What kind of institutional arrangements are in place to coordinate between government agencies and departments to implement the OGP action plan?  
**(Pengaturan kelembagaan seperti apa yang ada untuk mengkoordinasikan antara instansi pemerintah dan departemen untuk melaksanakan rencana aksi OGP?)**

*Maximum 1000 characters*

Masing-masing pemerintah daerah telah membentuk Tim Koordinasi Implementasi Pemerintahan Terbuka yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah masing-masing. Tim koordinasi ini bertanggung jawab dalam melaksanakan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah teknis pelaksana rencana aksi, dan konsolidasi dengan para pihak eksternal pemerintah daerah dalam mengembangkan co-kreasi, pelaksanaan, dan monitoring implementasi rencana aksi pemerintahan terbuka di daerah.

Secara struktur kelembagaan, tim koordinasi ini terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Pelaksana, Pendamping dan Monitoring Evaluasi. Untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan administrasi pemerintah daerah telah membentuk sekretariat Pemerintahan Terbuka di masing-masing daerah.


- 5.3. What kind of spaces have you used or created to enable the collaboration between government and civil society in the co-creation and implementation of this action plan? Mention both offline and online spaces. **(Ruang seperti apa yang telah Anda gunakan atau ciptakan untuk memungkinkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam penciptaan dan implementasi rencana aksi ini? Sebutkan ruang offline dan online.)**

*Maximum 1000 characters*

Masing-masing pemerintah daerah telah membentuk forum kolaborasi OGP Local Provinsi NTB sebagai wadah koordinasi dan kolaborasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program open government.

Ruang-ruang online disediakan untuk memfasilitasi proses koordinasi dan kolaborasi baik secara formal maupun informal antara pemerintah dan CSOs. Misalnya, menyediakan WhatsApp Grup tim masing-masing daerah dan WhatsApp Grup Bersama antar pemerintah daerah.





Rapat dan pertemuan tatap muka telah dilaksanakan beberapa kali, baik di sekretariat pemerintah maupun sekretariat CSO. Serial workshop penyusunan draf rencana aksi diselenggarakan baik di tingkat Provinsi NTB maupun di Kabupaten Sumbawa Barat. Terakhir, tim juga melaksanakan uji publik secara online atas rancangan rencana aksi yang telah disusun oleh konsorsium untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan pihak-pihak lain yang terlibat.

5.4. What measures did you take to ensure diversity of representation (including vulnerable or marginalized populations) in these spaces? **(Langkah-langkah apa yang Anda ambil untuk memastikan keragaman representasi (termasuk populasi yang rentan atau terpinggirkan) di ruang-ruang ini?)**

*Maximum 1000 characters*

- Forum Kolaborasi yang diadakan melibatkan dan memberikan ruang bagi setiap pemangku kepentingan untuk berdiskusi menyampaikan masukan dalam setiap tahapan pelaksanaan commitment OGP Local sesuai dengan kapasitas dan kepentingan dan kebutuhannya.
- Pemerintah daerah menyediakan ruang afirmatif dengan memberikan peran kepada CSOs mitra untuk menggali informasi, isu, aspirasi dan kebutuhan kelompok rentan. Misalnya, CSOs pendamping berdiskusi dengan beberapa perwakilan kelompok perempuan mantan buruh migran, perempuan kepala keluarga, dan perwakilan penyandang disabilitas serta akademisi di Kabupaten Sumbawa. Pertemuan juga dilakukan dengan perwakilan CSO lainnya secara terbatas sesuai dengan protocol kesehatan. Hasil dan temuan-temuan lapangan tersebut diolah oleh CSOs mitra sebagai bagian dari isu strategis yang akan ditangani melalui rencana aksi pemerintahan terbuka ini.


5.5. Who participated in these spaces?

*Mention the type of different groups that participated in the co-creation process.*

**(Sebutkan jenis kelompok berbeda yang berpartisipasi dalam proses co-creation.)**

*Maximum 1000 characters*

1. Pemerintah Provinsi NTB
2. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat
3. Komisi Informasi Provinsi NTB
4. Ombudsman perwakilan NTB
5. CSOs pendamping: SOMASI NTB, PWYP Indonesia, Fitra NTB, Legitimid, Solidarity Center
6. Perwakilan CSO lainnya yang bekerja di NTB; Media Link, Global Fund, Mitra Samya, Deaguru Institute dan Lingkar Study Madani (LSM).
7. Akademi dari Universitas Muhammadiyah Mataram dan Universitas Cordova Sumbawa Barat
8. Pemerintah desa
9. Perwakilan penyandang disabilitas
10. Perwakilan kelompok perempuan

- 
11. Perwakilan pendamping desa
  12. Tim Pembina dan Penggerak PKK Provinsi NTB dan Sumbawa Barat
  13. Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu Gotong Royong),
  14. Kader Sanitarian dan Agen Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong.
  15. Penyuluh Pertanian,
  16. Petugas Program Keluarga Harapan (PKH), dan
  17. Petugas Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS3R)

5.6. How many groups participated in these spaces? **(Berapa banyak grup yang berpartisipasi dalam ruang ini?)**

16

5.7. How many meetings were held in the co-creation process? **(Berapa banyak pertemuan yang diadakan dalam proses co-creation?)**

*Write a number between 0-50.*

25

5.8. How will government and non-governmental stakeholders continue to collaborate through the implementation of the action plan? **(Bagaimana pemangku kepentingan pemerintah dan non-pemerintah akan terus berkolaborasi melalui implementasi rencana aksi?)**

*Maximum 1000 characters*

Untuk memastikan kolaborasi antara pemerintah daerah dan CSOs dalam implementasi rencana aksi, pemerintah daerah melibatkan mereka dalam Tim Koordinasi Implementasi Pemerintahan Terbuka, baik sebagai Tim Pendamping dan Tim Monitoring Evaluasi. Forum kolaborasi multi-stakeholders dikembangkan dan akan melaksanakan pertemuan regular 1 kali dalam 3 bulan, atau sesuai kebutuhan. Pertemuan ini berfungsi untuk mengetahui progres pencapaian target kegiatan dan mencari solusi terhadap permasalahan yang muncul.

Grup chat WhatsUp OGP Local NTB juga senantiasa digunakan untuk koordinasi instan untuk merespon berbagai dinamika yang muncul dalam pelaksanaan commitment OGP Local Provinsi NTB

## 6. Monitoring of the OGP Action Plan

6.1. Please describe what is the Independent Monitoring Body you have identified for this plan? **(Tolong jelaskan apa Badan Pemantau Independen yang telah Anda identifikasi untuk rencana ini?)**



*Maximum 1000 characters*

Badan Pemantau OGP Local Provinsi NTB akan melibatkan berbagai kalangan, yaitu :  
Inspektorat Provinsi NTB, Akademisi, dan CSO

6.2. Provide the contact details for the independent monitoring body. **(Berikan detail kontak untuk badan pemantau independen)**

<b><i>Name of contact at the monitoring body</i></b>	<b><i>Title</i></b>	<b><i>Email</i></b>
Ayatullah Hadi, S.IP, M.IP	Dosen Universitas Muhammadiyah Mataram	hadi.ayatullah@yahoo.co.id
Hendriadi, SE, ME	Praktisi Keterbukaan Informasi	hendrianakjamal@gmail.com
Darwanto	Direktur Media Link	
Akhairuddin	Ketua Lembaga Riset Publikasi dan Pengabdian pada Masyarakat (LRP2M) Universitas Cordova	
Samsul Hidayat	Deaguru Institute	
Novi Irwansyah	Lingkar Studi Madani (LSM)	
<b><i>Add lines above as necessary</i></b>		

6.3. What types of activities will you have in place to discuss progress on commitments with stakeholders? **(Jenis kegiatan apa yang akan Anda lakukan untuk membahas kemajuan komitmen dengan pemangku kepentingan?)**

*Maximum 1000 characters*

Secara reguler atau sesuai dengan kebutuhan akan diselenggarakan pertemuan Forum Kolaborasi OGP Local dengan melibat berbagai pemangku kepentingan yang lebih luas, untuk membahas kemajuan pelaksanaan komitmen serta mencari solusi terhadap permasalahan yang muncul.

6.4. How will you regularly check in on progress with implementing agencies? **(Bagaimana Anda akan secara teratur memeriksa kemajuan dengan lembaga pelaksana?)**

*Maximum 1000 characters*

OPD pelaksana akan menyusun laporan bulanan terkait progress pelaksanaan komitmen. Selanjutnya akan melaksanakan Rapat Kerja secara regular yang menghadirkan seluruh Tim Koordinasi OGP Local Pemerintah Provinsi NTB dan OPD pelaksana rencana aksi.

6.5. How will you share the results of your monitoring efforts with the public? **(Bagaimana Anda akan membagikan hasil upaya pemantauan Anda kepada publik?)**

*Maximum 1000 characters*

Diseminasi hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi kepada publik akan dilaksanakan secara online untuk memastikan kemudahan akses dan jangkauan yang luas. Pemerintah Provinsi NTB akan menyampaikannya melalui website resmi pemerintah Provinsi NTB, yaitu pada halaman OGP Local NTB (<https://ntbprov.go.id/ogplocal>) dan berbagai akun sosial media milik pemerintah Provinsi NTB. Begitu pun dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat akan mempublikasi hasil pemantauan melalui website resmi pemerintah daerah (<https://sumbawabaratkab.go.id/ogplocal>) dan akun media social pemerintah daerah dalam bentuk laporan lengkap dan infografis yang menarik dan mudah dipahami masyarakat.

## 7. Endorsement from Non-Governmental Stakeholders

*List the non-governmental stakeholders who participated in the co-creation process and endorse this action plan. (Buat daftar pemangku kepentingan non-pemerintah yang berpartisipasi dalam proses penciptaan bersama dan dukung rencana aksi ini.)*

<b>Name</b>	<b>Title</b>	<b>Affiliated entity (if any)</b>
Syuaeb, S.Hi	Ketua	Komisi Informasi NTB
Dwi Arie Santo	Direktur	Somasi NTB
Arianto Nugroho	Direktur	PWYP Indonesia
Dewi	Staff	Open Government Indonesia
Tauhid Sulaeman	Kordinator	Pendamping Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi NTB
Ramli	Direktur	Fitra NTB
Syahrul Mustafa	Direktur	Legitimid
Sutikno	Sekretaris	Solidarity Center
Akhairuddin	Direktur	Deaguru Institute
Samsul Hidayat	Direktur	Lingkar Studi Madani
Novi Irwansyah	Direktur	LRP2M Universitas Cordova
<b>Add lines above as necessary</b>		

## 8. Upload the full Open Government Strategy, if available, or other relevant documents.



*This option is available in the online form.*

**9. If you held an online co-creation/consultation please include the link of the website here:**

*Maximum 1000 characters*

Uji Publik Rancangan Rencana Aksi OGP Local NTB vis Zoom Meeting :  
[https://zoom.us/rec/share/JfejO9SxEIDEZYgWdIM9vBr0x0Yz1I4WPqeFctN7GHDypmwNkF7iOEZvYU-PasSP.Unt-ETVtBoINBV\\_n](https://zoom.us/rec/share/JfejO9SxEIDEZYgWdIM9vBr0x0Yz1I4WPqeFctN7GHDypmwNkF7iOEZvYU-PasSP.Unt-ETVtBoINBV_n)

Access Passcode: Q3+ # \$8Uc